

IMPLEMENTASI SISTEM TANAM PAKSA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KONDISI EKONOMI RAKYAT INDONESIA

Zuhro Tamanna Daulay¹, Nella Saskya Sinurat², Yuli Tri Rezki³, Seli Melisa Putri Lubis⁴,
Flores Tanjung⁵

¹ Universitas Negeri Medan. E-mail: zuhrotamannadaulay12@gmail.com

² Universitas Negeri Medan. E-mail: nellasinurat9@gmail.com

³ Universitas Negeri Medan. E-mail: yulitrirezki@gmail.com

⁴ Universitas Negeri Medan. E-mail: selimelisaputri@gmail.com

⁵ Universitas Negeri Medan. E-mail: flores_tanjung@yahoo.co.id

INFORMASI ARTIKEL

Submitted : 2026-03-31
Review : 2026-03-31
Accepted : 2026-03-31
Published : 2026-03-31

KATA KUNCI

Sistem Tanam Paksa, Kolonialisme Belanda, Ekonomi Rakyat, Eksploitasi Ekonomi.

A B S T R A K

Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia sejak tahun 1830 ketika Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch menjabat. Kebijakan ini mewajibkan masyarakat lokal untuk menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila di sebagian lahan pertanian mereka, di mana hasilnya harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Tujuan utama dari pelaksanaan sistem ini adalah untuk meningkatkan pendapatan Belanda setelah mengalami masalah keuangan. Dalam praktiknya, sistem tanam paksa melibatkan pemerintah kolonial serta pejabat lokal dalam proses pengawasan dan pengumpulan hasil tanaman dari masyarakat. Meskipun kebijakan ini mampu memberikan keuntungan besar bagi Belanda, dampak negatifnya terhadap masyarakat Indonesia sangat besar. Banyak petani kehilangan kesempatan untuk menanam tanaman pangan, yang lalu mengakibatkan kemiskinan, kelaparan, dan penurunan kesejahteraan di beberapa wilayah Pulau Jawa. Selain itu, sistem tanam paksa juga memperkuat struktur ekonomi kolonial yang bersifat eksploitatif terhadap masyarakat lokal. Dengan demikian, penerapan sistem tanam paksa bukan hanya berfungsi sebagai kebijakan ekonomi kolonial, tetapi juga sebagai bentuk eksploitasi yang memberikan dampak signifikan pada kondisi ekonomi masyarakat Indonesia selama masa penjajahan Belanda.

A B S T R A C T

The Cultivation System (Cultuurstelsel) was an economic policy implemented by the Dutch colonial government in Indonesia starting in 1830 during the administration of Governor-General Johannes van den Bosch. This policy required local communities to cultivate export commodities such as coffee, sugarcane, and indigo on a portion of their agricultural land, the results of which had to be submitted to the colonial government. The main objective of implementing this system was to increase the revenue of the Netherlands after experiencing financial difficulties. In practice, the cultivation system involved the colonial government as well as local officials in supervising and collecting agricultural products from the community. Although this policy succeeded in generating significant profits for the Netherlands, its

Keywords: Cultivation System, Dutch Colonialism, Economic Exploitation, Indonesian Society.

negative impact on Indonesian society was substantial. Many farmers lost the opportunity to grow food crops, which led to poverty, famine, and a decline in welfare in several regions of Java. Furthermore, the cultivation system strengthened the colonial economic structure that was exploitative toward local communities. Therefore, the implementation of the cultivation system not only functioned as a colonial economic policy but also represented a form of exploitation that had a significant impact on the economic conditions of Indonesian society during the Dutch colonial period.

PENDAHULUAN

Sistem Tanam Paksa atau Cultuurstelsel adalah salah satu kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Belanda di Indonesia pada abad ke-19. Kebijakan ini mulai dilaksanakan pada tahun 1830 di bawah Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Sistem ini mewajibkan rakyat lokal, terutama di Pulau Jawa, untuk menanam berbagai komoditas ekspor seperti kopi, tebu, nila, dan teh di sebagian dari lahan pertanian mereka. Hasil dari tanaman ini kemudian harus diserahkan kepada pihak kolonial Belanda sebagai kewajiban kepada negara. Kebijakan ini diimplementasikan sebagai respons pemerintah Belanda untuk mengatasi krisis finansial yang terjadi setelah perang yang berkepanjangan dan berbagai masalah ekonomi di Eropa. Melalui tanam paksa, pemerintah kolonial berusaha memaksimalkan produksi komoditas ekspor dari daerah jajahan untuk meningkatkan pendapatan negara Belanda.

Dalam praktiknya, sistem tanam paksa melibatkan pihak kolonial, pejabat lokal, dan aparat dalam mengawasi hasil tanaman yang diproduksi oleh masyarakat. Secara teoritis, sistem ini mensyaratkan masyarakat untuk menggunakan sekitar 20 persen dari lahan pertanian mereka untuk menanam tanaman ekspor. Namun, dalam realitasnya, ketentuan tersebut sering kali tidak diterapkan dengan benar. Banyak petani yang terpaksa mengerjakan lahan jauh lebih luas dari ketentuan yang ada, dan terkadang mereka harus meninggalkan tanaman pangan yang penting untuk memenuhi kebutuhan produksi komoditas ekspor. Situasi ini menyebabkan munculnya berbagai permasalahan ekonomi dan sosial di kalangan masyarakat, seperti meningkatnya kemiskinan, kelangkaan pangan, serta menurunnya kesejahteraan di berbagai wilayah, khususnya di Pulau Jawa.

Studi mengenai sistem tanam paksa telah banyak dilakukan oleh sejarawan karena kebijakan ini dilihat sebagai bentuk eksploitasi ekonomi kolonial yang sangat berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa sistem tanam paksa memberikan manfaat yang sangat besar bagi pemerintah Belanda dan bahkan membantu memperbaiki kondisi keuangan negara itu pada pertengahan abad ke-19. Namun, di sisi lain, kebijakan ini membawa penderitaan yang besar bagi masyarakat lokal yang harus menghadapi beban kerja berat tanpa imbalan yang fair. Oleh sebab itu, sistem tanam paksa sering dianggap sebagai contoh nyata bagaimana sistem ekonomi kolonial dibangun di atas eksploitasi tenaga kerja dan sumber daya masyarakat setempat.

Artikel ini bertujuan untuk membahas dua hal penting mengenai sistem tanam paksa di Indonesia. Pertama, menjelaskan latar belakang dan proses penerapan sistem tanam paksa oleh pemerintah kolonial Belanda. Kedua, menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap kondisi ekonomi masyarakat Indonesia, terutama para petani lokal. Dengan memahami kedua aspek ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih

baik tentang bagaimana kebijakan ekonomi kolonial memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode sejarah. Metode sejarah mencakup empat langkah, yaitu: (1) mengumpulkan sumber-sumber, (2) melakukan kritik terhadap sumber untuk menilai kebenaran dan keandalannya, (3) melakukan interpretasi guna memahami fakta-fakta sejarah, dan (4) menyusun sejarah atau historiografi. Dalam pengumpulan data, penulis melakukan tinjauan literatur dengan membaca berbagai sumber primer dan sekunder seperti jurnal akademik, buku, serta dokumen sejarah yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Penerapan Sistem Tanam Paksa

Sistem Tanam Paksa, yang juga dikenal sebagai *Cultuurstelsel*, adalah sebuah kebijakan ekonomi kolonial yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda di Indonesia sejak tahun 1830 di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Kebijakan ini diciptakan sebagai reaksi pemerintah Belanda terhadap masalah keuangan yang dihadapi negara tersebut pada awal abad ke-19. Masalah ini timbul akibat berbagai faktor, seperti pengeluaran besar yang harus ditanggung Belanda karena keterlibatan dalam perang di Eropa, termasuk efek dari peperangan pada masa pemerintahan Napoleon, serta biaya tinggi untuk mengelola dan menjaga wilayah koloni di Asia (Susanto, 2014). Situasi ini mendorong pemerintah Belanda untuk mencari sumber pendapatan baru agar bisa memulihkan kondisi keuangan negara. Akibatnya, pemerintah kolonial berupaya memanfaatkan daerah yang dijajah, terutama Indonesia, sebagai sumber pendapatan ekonomi melalui produksi berbagai komoditas ekspor yang bernilai tinggi di pasar internasional (Notosusanto, 2008).

Dengan kebijakan ini, pemerintah kolonial Belanda menerapkan metode pertanian yang berfokus pada produksi barang-barang ekspor demi kepentingan pasar global. Indonesia, yang memiliki tanah subur dan iklim yang mendukung, dianggap sangat berpotensi menghasilkan beragam tanaman perdagangan seperti kopi, tebu, nila, teh, dan beberapa komoditas lainnya yang memiliki permintaan besar di pasar internasional. Dengan memanfaatkan tenaga kerja masyarakat lokal dan kekayaan sumber daya alam, pemerintah kolonial berharap bisa meraih keuntungan besar dari penjualan komoditas tersebut di pasar global.

Dalam kebijakan sistem tanam paksa, masyarakat kita diwajibkan untuk menanam berbagai tanaman ekspor di sebagian lahan pertanian mereka. Secara resmi, pemerintah kolonial menetapkan bahwa para petani hanya diperbolehkan menggunakan sekitar sepertiga dari lahan mereka untuk menanam tanaman ekspor. Selain itu, waktu yang digunakan untuk mengolah tanaman ekspor seharusnya tidak melebihi waktu yang biasa digunakan untuk menanam tanaman pangan, seperti padi. Pemerintah kolonial juga mengatur bahwa jika ada kegagalan panen yang bukan akibat kesalahan petani, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemerintah. Aturan-aturan ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kesan bahwa sistem tanam paksa tidak akan merugikan masyarakat lokal (Katodirjo, 1993)

Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan sistem tanam paksa sering tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial. Banyak pejabat kolonial dan pejabat lokal yang berperilaku melanggar dalam pelaksanaan kebijakan ini. Untuk

memenuhi target produksi yang tinggi, para petani seringkali dipaksa untuk menanam tanaman ekspor di lahan yang lebih luas daripada yang seharusnya. Dalam beberapa situasi, masyarakat bahkan harus mengorbankan sebagian besar lahan yang biasanya digunakan untuk menanam pangan. Keadaan ini membuat para petani kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri karena produksi bahan pangan mengalami penurunan yang signifikan.

Di samping itu, warga juga diharuskan melakukan berbagai tugas tambahan yang berkaitan dengan produksi tanaman yang diekspor, seperti merawat tanaman, memanen hasil, hingga mengirimkan hasil panen ke lokasi pengumpulan yang telah ditentukan oleh pemerintah kolonial. Beban kerja yang berat ini sering kali tidak sebanding dengan imbalan yang adil bagi masyarakat. Akibatnya, kondisi ekonomi warga pribumi semakin terjepit dan banyak petani yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa sistem tanam paksa sebenarnya adalah bentuk eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap masyarakat pribumi untuk kepentingan ekonomi negara penjajah (Notosusanto, 2008).

2. Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Indonesia

Implementasi sistem tanam paksa di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, tetapi juga melibatkan struktur pemerintahan lokal yang sudah ada. Pejabat lokal seperti bupati dan kepala desa berperan penting dalam mengawasi pelaksanaan sistem ini di tingkat daerah. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat memenuhi kewajiban untuk menanam tanaman ekspor dan menyerahkan hasil panen kepada pemerintah kolonial (Notosusanto, 2008).

Namun, dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan. Banyak pejabat lokal yang memaksa masyarakat untuk menanam tanaman ekspor dalam jumlah yang melebihi ketentuan. Bahkan dalam beberapa kasus, petani terpaksa mengolah lahan yang lebih luas untuk tanaman ekspor, sehingga mereka tidak memiliki waktu atau lahan yang cukup untuk menanam tanaman pangan. Hal ini mengakibatkan beban kerja masyarakat semakin berat dan berdampak negatif pada perekonomian mereka (Wibowo, 2017).

Selain itu, masyarakat juga diwajibkan untuk menyerahkan hasil panen kepada pemerintah kolonial dengan tarif yang telah ditentukan. Pemerintah Belanda kemudian menjual hasil tanaman tersebut di pasar internasional dengan harga yang jauh lebih tinggi, sehingga mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Keuntungan tersebut sebagian besar digunakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi Belanda yang sebelumnya mengalami krisis di awal abad ke-19 (Notosusanto, 2008).

3. Pengaruh Sistem Tanam Paksa terhadap Kondisi Ekonomi Rakyat Indonesia

Implementasi sistem tanam paksa memiliki dampak yang signifikan terhadap keadaan ekonomi penduduk Indonesia, terutama bagi para petani di Pulau Jawa. Salah satu dampak utama dari kebijakan ini adalah perubahan dalam cara bertani masyarakat. Sebelum sistem ini diterapkan, sebagian besar penduduk lokal menanam tanaman pangan seperti padi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Namun, setelah kebijakan tersebut diberlakukan, masyarakat terpaksa mengalihkan sebagian besar tenaga dan lahan mereka untuk menanam tanaman ekspor yang dibutuhkan oleh pemerintah kolonial Belanda (Katodirjo, 1993)

Perubahan dalam cara bertani ini menyebabkan warga mengalami kesulitan dalam mendapatkan pangan mereka sendiri. Dengan sebagian lahan digunakan untuk tanaman ekspor, hasil pertanian untuk pangan berkurang. Akibatnya, di beberapa wilayah terjadi kelangkaan makanan yang berujung pada peningkatan kemiskinan serta terjadinya

kelaparan di kalangan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem tanam paksa tidak hanya memengaruhi aspek ekonomi masyarakat tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial mereka secara menyeluruh (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008). Di samping itu, sistem tanam paksa juga meningkatkan beban kerja bagi masyarakat lokal. Para petani tidak hanya diwajibkan untuk mengolah lahan pertanian guna menanam tanaman ekspor, tetapi juga harus melakukan pekerjaan tambahan seperti mengangkut hasil panen dan bekerja di kebun yang dimiliki pemerintah kolonial. Beban kerja yang berat ini tidak diimbangi dengan kompensasi yang cukup, sehingga kondisi ekonomi masyarakat tetap dalam keadaan sulit (Susanto, 2014).

Dampak lain dari sistem tanam paksa adalah munculnya ketidakadilan ekonomi antara pemerintah kolonial dan penduduk lokal. Keuntungan besar dari penjualan komoditas ekspor seperti kopi, gula, dan nila sebagian besar dinikmati oleh pemerintah Belanda. Pendapatan dari penjualan tersebut bahkan membantu memperbaiki kondisi keuangan negeri Belanda di pertengahan abad ke-19. Sementara itu, masyarakat lokal yang berperan sebagai tenaga utama dalam proses produksi hanya mendapatkan manfaat yang sangat sedikit dari sistem ini. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem tanam paksa merupakan bentuk eksploitasi ekonomi yang diterapkan pemerintah kolonial terhadap masyarakat setempat (Katodirjo, 1993).

Di sisi lain, penerapan sistem tanam paksa juga berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi kolonial di Indonesia. Produksi tanaman ekspor meningkat secara signifikan dan Indonesia mulai dikenal sebagai salah satu penghasil komoditas penting di pasar global. Namun, keuntungan dari pertumbuhan ekonomi tersebut lebih banyak dinikmati oleh pemerintah kolonial dan para pedagang asing ketimbang masyarakat lokal yang justru harus menanggung beban produksi yang berat (Notosusanto, 2008). Walaupun kebijakan ini berhasil meningkatkan pendapatan pemerintah Belanda, dampaknya bagi masyarakat setempat justru memunculkan berbagai masalah ekonomi seperti kemiskinan, kelaparan, dan meningkatnya beban kerja penduduk.

KESIMPULAN

Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) merupakan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia sejak tahun 1830 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara Belanda yang sedang mengalami krisis keuangan dengan memanfaatkan sumber daya dan tenaga kerja masyarakat di wilayah jajahan (Katodirjo, 1993). Dalam pelaksanaannya, masyarakat pribumi diwajibkan menanam berbagai komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila pada sebagian lahan pertanian mereka, yang hasilnya kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial.

Penerapan sistem tanam paksa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya para petani. Banyak masyarakat yang harus mengalihkan lahan pertanian mereka dari tanaman pangan ke tanaman ekspor sehingga menyebabkan berkurangnya produksi bahan makanan. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya kemiskinan, kekurangan pangan, serta menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat di beberapa wilayah, terutama di Pulau Jawa (Wibowo, 2017). Selain itu, sistem ini juga memperlihatkan adanya eksploitasi ekonomi oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap masyarakat pribumi, di mana keuntungan besar dari hasil produksi tanaman ekspor lebih banyak dinikmati oleh pemerintah kolonial dibandingkan oleh masyarakat yang mengerjakannya.

Maka dari itu, sistem tanam paksa tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan ekonomi kolonial, tetapi juga menjadi salah satu bentuk eksploitasi yang memberikan pengaruh besar terhadap kondisi ekonomi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kebijakan ini menunjukkan bagaimana sistem ekonomi kolonial dibangun dengan memanfaatkan sumber daya dan tenaga kerja masyarakat lokal untuk kepentingan negara penjajah. (Katodirjo, 1993).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik & A.B. Lopian (Ed.). 2012. Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 4: Kolonisasi dan Perlawanan. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Darmawan, Wawan. 2010. Sejarah Ekonomi Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Djoko Suryo. 2002. Sejarah Sosial Pedesaan Jawa Abad XIX. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kartodirdjo, Sartono. 1993. Pengantar Sejarah Indonesia Baru Jilid 1: Dari Emporium sampai Imperium. Jakarta: Gramedia.
- Poesponegoro, Marwati Djoened & Nugroho Notosusanto. 2008. Sejarah Nasional Indonesia IV. Jakarta: Balai Pustaka.
- Susanto, Nugroho. 2014. Sejarah Kolonialisme di Indonesia. Yogyakarta: Ombak.
- Wahyudi, Agus. 2015. "Sistem Tanam Paksa dan Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa." Jurnal Pendidikan Sejarah".
- Wibowo, A. 2017. "Dampak Sistem Tanam Paksa terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Abad XIX." Jurnal Sejarah dan Budaya.